



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

EXECUTIVE
SUMMARY

.....

INDEKS TOLERANSI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

.....



2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DAFTAR ISI

Halaman:

Daftar Isi	I
Daftar Tabel	Ii
Daftar Gambar	Iii
A. Kondisi Toleransi Antar Umat Beragama dan Etnis di Kabupaten Sidoarjo	1
B. Geografis Kabupaten Sidoarjo	2
C. Kondisi Demografi	3
D. Profil Responden	4
E. Analisa Hasil Kuisisioner	5
F. Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo	11
G. Kesimpulan	11
H. Saran	12

DAFTAR TABEL

Halaman:

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Sidoarjo	3
Tabel 2. Frekuensi Persepsi Terhadap Toleransi	5
Tabel 3. Frekuensi Sikap Terhadap Toleransi	6
Tabel 4. Frekuensi Kerjasama Antar Etnis dan Agama Yang Berbeda .	7
Tabel 5. Frekuensi Sikap Pemerintah Dalam Hubungan Antar umat Beragama dan Etnis Bangsa	8
Tabel 6. Frekuensi Harapan Terhadap Pemerintah	9
Tabel 7. Capaian Indeks Toleransi Beserta Komponen Indikatornya ..	11

DAFTAR GAMBAR

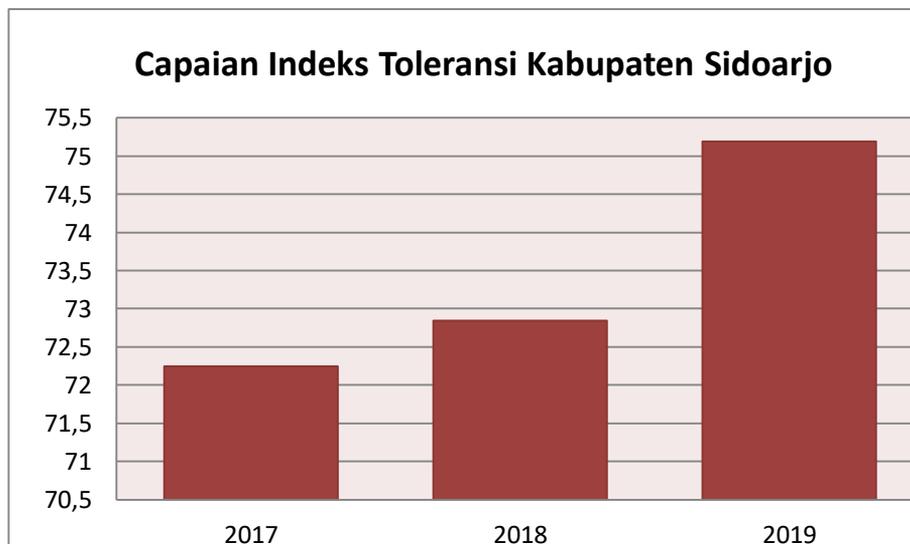
Halaman:

Gambar 1. Grafik Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2019	1
Gambar 2. Peta Administratif Kabupaten Sidoarjo	3
Gambar 3. Grafik Capaian Indeks Tiap-Tiap Variabel	11

RINGKASAN EXECUTIVE

I. Kondisi Toleransi Antar Umat Beragama dan Etnis Di Kabupaten Sidoarjo

Menyadari peran penting toleransi bagi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Salah satunya adalah menjadikan Indeks Toleransi sebagai salah satu indikator kinerja daerah. Dalam tiga tahun terakhir capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang menggembirakan sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Ekspose Monev Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD Kab. Sidoarjo Tahun 2019

Gambar 1
Grafik Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2019

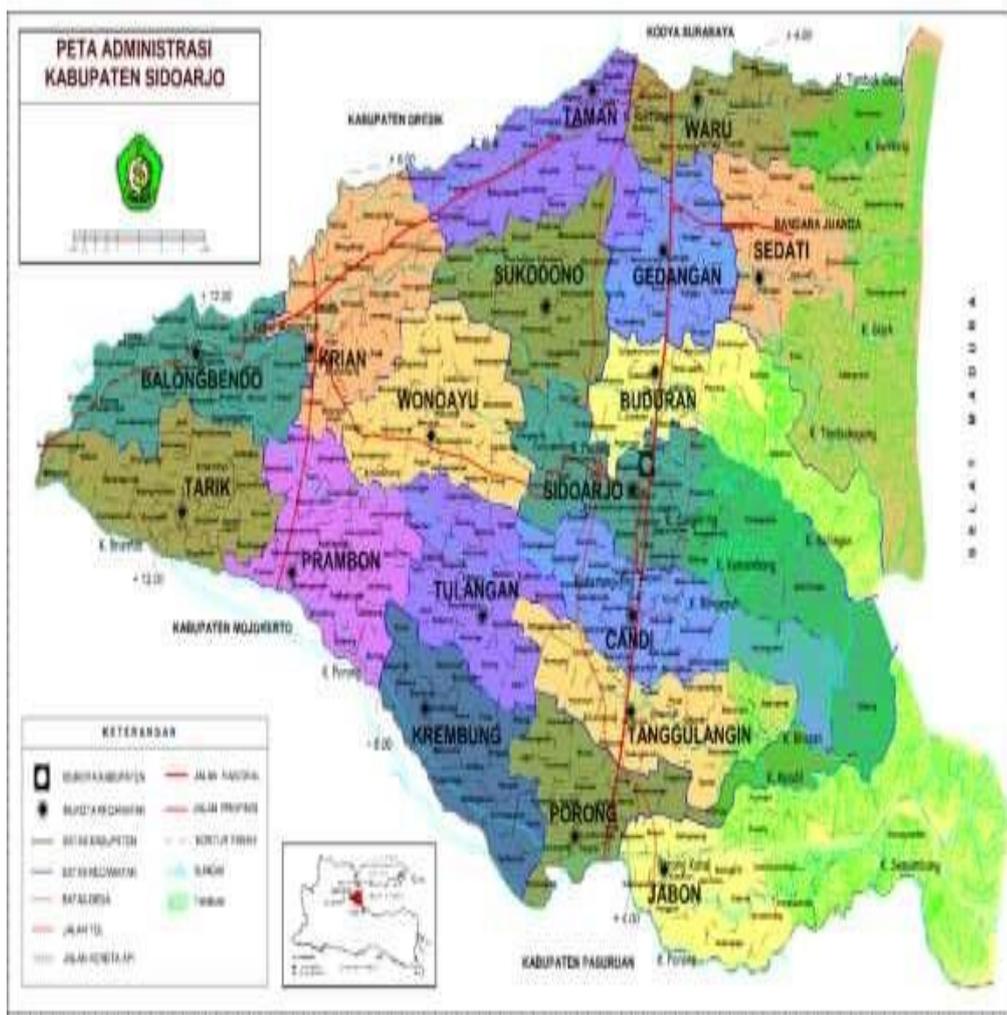
Memperhatikan grafik di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil meningkatkan toleransi masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Toleransi yang terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 mencapai nilai Indeks Toleransi yaitu 72,25, dan pada tahun 2018 naik menjadi 72,84 dan meningkat drastis semakin baik pada tahun 2019 yaitu 75,19.

J. Geografis Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo terletak antara $112^{\circ} 5' - 112^{\circ} 9'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' - 7^{\circ} 5'$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang subur karena berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas yaitu Kali Mas dan Kali Porong. Lokasi Kabupaten Sidoarjo sangat strategis karena dilalui jalan arteri primer Surabaya–Malang, Surabaya–Banyuwangi, dan Surabaya–Madiun. Adapun luas wilayah daratan adalah sebesar $714,245 \text{ km}^2$ dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar $201,6868 \text{ km}^2$. Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam Provinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut:

- SebelahUtara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- SebelahTimur : Selat Madura
- SebelahSelatan : Kabupaten Pasuruan
- SebelahBarat : Kabupaten Mojokerto

Kondisi topografis Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang diapit Kali Surabaya (di sebelah Utara) dan Kali Porong (di sebelah Selatan) dengan kemiringan tanah 2% (landai), berada pada ketinggian 0-25 meter dpl, daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki dua karakteristik air tanah. Pada bagian Timur seluas $214,20 \text{ km}^2$ (29,99%) berketinggian 0-3 meter dpl berair tawar, banyak dimanfaatkan untuk permukiman, perdagangan dan perkantoran. Sedangkan dibagian Barat $208,56$ (29,20%) berair tawar, banyak dimanfaatkan untuk pertanian.



Gambar 2
Peta Administratif Kabupaten Sidoarjo

K. Kondisi Demografi

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018–2019
Tarik	72.206	1,26
Prambon	85.157	1,26
Krembung	75.731	1,37
Porong	85.700	-0,10
Jabon	61.092	0,71
Tanggulangin	106.685	0,64
Candi	168.779	1,95
Tulangan	107.683	2,12
Wonoayu	90.794	1,78
Sukodono	132.644	1,99
Sidoarjo	228.713	1,31
Buduran	108.457	2,09
Sedati	111.788	1,78
Waru	240.674	0,55

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018–2019
Gedangan	134.787	0,95
Taman	235.238	0,81
Krian	140.183	1,72
Balongsendo	80.222	1,07
Kabupaten Sidoarjo	2.266.533	1,27
Hasil Registrasi	2.266.533	1,27
Hasil Proyeksi 1	2.249.476	

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

L. Profil Responden

Untuk mengetahui status dan besaran indeks toleransi di Kabupaten Sidoarjo, kajian ini telah melakukan survey di 18 kecamatan, yakni Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Balongsendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Prambon, Kecamatan Porong, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Wonoayu.

Profil dari responden yang terpilih, di uraikan seperti berikut ini:

- a) Perempuan 44% dan Laki-laki 56%
- b) Usia kurang dari 19 tahun (9%), antara 20-39 tahun (42,6%), antara 40-59 tahun (32,8%), usia 59-60 (11,5%) dan usia di atas 60 tahun (4,1%).
- c) Berpendidikan SD (3,8%), SMP (12,3%), SMA (47,7%) dan Sarjana atau yang pernah kuliah (36,2%).
- d) 34% adalah karyawan swasta, 2,5% sebagai pelajar, PNS sebanyak 14,2%, sebagai wirausaha 21,4%, sebagai mahasiswa 7,1%. Berdinas sebagai TNI/Polri sebanyak 5,6%, responden guru dan dosen 5%, sedangkan responden dengan jenis pekerjaan atau profesi yang lain seperti ibu rumah tangga, pelajar, buruh, petani, pedagang, dll sebanyak 10,2%.

e) Tingkat penghasilan Rp 3.000.001–6.000.000 (44%), atas Rp 6.000.000 (7,6%), antara Rp 1.000.001–3.000.000 (30,8%) dan di bawah Rp 1.000.000 (17,6%).

f) Memiliki status etnis tertentu (tercatat ada 21 jenis etnis bangsa).

M. Analisa Hasil Kuisisioner

1. Variabel Sikap Terhadap Toleransi

Tabel 2.
Frekuensi Persepsi Terhadap Toleransi

No	Persepsi Terhadap Toleransi	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia	54,30%	46%	0%	0%	0%
2.	Menjalankan ibadah menurut agama masing-masing merupakan bagian dari hak asasi manusia	78%	22%	0%	0%	0%
3.	Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing	70%	30%	0%	0%	0%
4.	Perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat	85%	15%	0%	0%	0%
5.	Agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap toleran atau menghargai agama lain	75%	25%	0%	0%	0%
6.	Penyebaran agama kepada penganut agama lain tidak diperbolehkan	78%	22%	0%	0%	0%
7.	Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap pemeluk agama lainnya	70%	30%	0%	0%	0%
8.	Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara verbal terhadap pemeluk agama lainnya	90%	10%	0%	0%	0%
9.	Kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut	87%	13%	0%	0%	0%
10.	Di lingkungan tempat tinggal saya pernah terjadi konflik antar umat Bergama	89%	11%	0%	0%	0%
11.	Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan politik	95%	5%	0%	0%	0%

No	Persepsi Terhadap Toleransi	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
12.	Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan ekonomi	87%	11%	0%	0%	2%
13.	Konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing-masing pemeluk agama	87%	10%	3%	0%	0%
14.	Kerjasama antar umat beragama sudah terjalin dengan baik	78,20%	20%	0,30%	0,80%	0,80%
15.	Para tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga toleransi umat beragama dan antar etnis	81,30%	16%	0,80%	1,50%	0%
16.	Organisasi keagamaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga toleransi umat beragama dan antar etnis	76%	20%	2%	1,80%	0,20%
17.	Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga toleransi bermasyarakat antar umat beragama dan etnis	77,40%	20%	0%	2,80%	0,20%

Sumber : Data responden diolah

2. Variabel Sikap Terhadap Toleransi

Tabel 3.
Frekuensi Sikap Terhadap Toleransi

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya bersedia bertetangga dengan pemeluk agama dan etnis lain	93%	7%	0%	0%	0%
2.	Saya bersedia bergaul dengan pemeluk agama dan etnis lain	93%	7%	0%	0%	0%
3.	Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama dan etnis lain	90%	10%	0%	0%	0%
4.	Saya bersedia menikah dengan pemeluk agama dan etnis lain	89%	11%	0%	0%	0%
5.	Dalam melakukan hubungan sosial saya tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan agama dan etnisnya	96%	4%	0%	0%	0%
6.	Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatnya di lingkungan tempat tinggal saya	90%	10%	0%	0%	0%
7.	Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal saya	97%	3%	0%	0%	0%
8.	Saya tidak pernah berselisih paham dengan pemeluk agama dan etnis	98%	2%	0%	0%	0%

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
	lain					
9.	Saya bersedia musyawarah/ berdamai dengan pemeluk agama dan etnis lain bila terjadi perselisihan	98%	2%	0%	0%	0%
10.	Keberadaan ajaran- ajaran agama lain diluar yang sudah ditetapkan oleh negara meresahkan	99%	0%	0%	1%	0%
11	Saya bersedia tinggal bersama dengan penganut agama dan etnis lain dalam satu lingkungan masyarakat	89%	11%	0%	0%	0%
12	Saya tidak keberatan bekerjasama dengan agama lain dan antar etnis lain	87%	13%	0%	0%	0%
13	Saya tidak keberatan membantu kegiatan adat etnis lain yang menjadi tetangga/saudara saya	97,70%	2%	0%	0%	0%
14	Saya tidak keberatan menikah dengan beda etnis	90%	10%	0%	0%	0%
15	Saya tidak keberatan hadir dalam undangan acara orang yang berbeda etnis dengan saya	99%	1%	0%	0%	0%
16	Saya tidak meremehkan adat, budaya dan bahasa etnis/ agama lain yang berbeda dengan saya	93%	7%	0%	0%	0%

Sumber : Data responden diolah

3. Variabel Kerjasama Antar Etnis dan Agama yang Berbeda

Tabel 4.
Frekuensi Kerjasama Antar Etnis dan Agama Yang Berbeda

No	Pertanyaan Kategori Indeks Kerjasama	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya bersedia mengundang pemeluk agama / etnis lain dalam kegiatan yang saya lakukan (hajatan, syukuran, dll)	95%	5%	0%	0%	0%
2.	Saya bersedia menghadiri undangan dari pemeluk agama / etnis lain	98%	2%	0%	0%	0%
3.	Saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama / etnis lain yang memerlukan nya	70%	25,20%	4,80%	0%	0%
4.	Saya bersedia melakukan hubungan kerja sama dengan pemeluk agama /etnis lain	82%	15%	3%	0%	0%
5.	Saya bersedia membantu pemeluk agama / etnis lain untuk membangun rumah ibadahnya	98%	0%	2%	0%	0%
6.	Saya bersedia mengizinkan kegiatan	89%	8%	2%	1%	0%

No	Pertanyaan Kategori Indeks Kerjasama	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
	dari pemeluk agama / etnis lain					
7.	Saya bersedia mendengarkan saran dari tokoh agama / etnis lain	96%	4%	0%	0%	0%
8	Saya bersedia membantu kesulitan pemeluk agama / etnis lain	98%	0%	2%	0%	0%
9	Saya bersedia kerjasama dalam hubungan masyarakat dengan pemeluk agama/ etnis lain	97%	2%	1%	0%	0%
10	Saya bersedia berbagi ilmu dengan pemeluk agama / etnis lain	95%	4,50%	0,50%	0%	0%
11	Saya bersedia berkolaborasi dalam bidang usaha dengan pemeluk agama / etnis lain	98%	1%	1%	0%	0%
12	Saya bersedia menjenguk orang sakit dengan pemeluk agama atau etnis lain	90%	10%	0%	0%	0%
13	Saya bersedia kerjasama dalam membangun desa dengan pemeluk agama / etnis lain	95%	4%	1%	0%	0%
14	Saya bersedia kerjasama dalam kompetisi meraih prestasi dengan pemeluk agama / etnis lain	96%	4%	0%	0%	0%
15	Saya bersedia kerjasama dalam pengembangan ilmu pendidikan dengan pemeluk agama / etnis lain	99%	0,50%	0,50%	0%	0%

Sumber : Data responden diolah

4. Variabel Sikap Pemerintah Dalam Hubungan Antar Umat Beragama dan Etnis Bangsa

Tabel 5.
Frekuensi Sikap Pemerintah Dalam Hubungan Antar umat Beragama dan Etnis Bangsa

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Pemerintah memfasilitasi pembangunan rumah peribadatan dengan baik	80%	13%	4%	2,70%	0,30%
2.	Pemerintah melakukan sosialisasi tentang aturan pendirian rumah peribadatan dengan baik	62%	29,60%	6,10%	2%	0,30%
3.	Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan forum kesukuan dengan baik	66,70%	26,90%	4,40%	1,50%	0,50%
4.	Prosedur perijinan pendirian sarana peribadatan yang ada sekarang sudah menjamin hak yang sama bagi tiap agama untuk membangun rumah ibadahnya	67,60%	24%	5,10%	3,10%	0,20%

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
5.	Prosedur perijinan pendirian sarana peribadatan yang ada sekarang dijalankan secara konsisten kepada semua pemeluk agama	68,20%	22,10%	6,20%	3,30%	0,20%
6.	Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat Beragama dan antar komunitas etnis bangsa dengan baik	70,70%	21,40%	6,60%	1%	0,30%
7.	Pemerintah sering mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai agama dan etnis bangsa	89%	9,20%	0%	0,80%	1%
8.	Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama dan etnis bangsa	98%	2%	0%	0%	0%
9.	Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama dan etnis bangsa	89%	10%	0%	0%	1%
10.	Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama	98%	0%	0%	1%	1%
11.	Pemerintah melindungi kebebasan beribadah tiap agama	89%	10%	0%	0,50%	0,50%
12.	Pemerintah membina kerukunan antar umat beragama dan antar etnis bangsa	65%	29%	6%	0%	0%
13.	Pemerintah memberikan bantuan materiil/moril dalam meningkatkan persatuan antar etnis bangsa	38%	59%	3%	0%	0%
14.	Pemerintah menyelenggarakan kegiatan besar kebudayaan dan agama secara rutin tahunan sebagai bentuk apresiasi	90%	10%	0	0	0

Sumber: Data responden diolah

5. Variabel Harapan Terhadap Pemerintah

Tabel 6.
Frekuensi Harapan Terhadap Pemerintah

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Pemerintah perlu memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan	90%	10%	0%	0%	0%
2.	Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan	89,50%	10%	0,50%	0%	0%
3.	Pemerintah perlu memfasilitasi kegiatan- kegiatan keagamaan	89%	10,20%	0,50%	0,30%	0%
4.	Prosedur perijinan pendirian sarana peribadatan yang ada sekarang perlu menjamin hak yang sama bagi tiap agama untuk membangun rumah	87,00%	12%	1%	0%	0%

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
	ibadahnya					
5.	Prosedur perijinan pendirian sarana peribadatan yang ada sekarang perlu dijalankan secara konsisten kepada semua pemeluk agama	93%	6,20%	0,80%	0%	0%
6.	Pemerintah perlu memfasilitasi dialog antar umat Beragama dengan baik	88%	11%	1%	0%	0%
7.	Pemerintah perlu sering mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai agama dan suku bangsa	90%	10%	0%	0%	0%
8.	Pemerintah perlu bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama dan etnis	93%	6,50%	0,50%	0%	0%
9.	Pemerintah perlu bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama dan etnis	93%	7%	0,50%	0%	0%
10.	Pemerintah perlu bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama	98%	2%	0%	0%	0%
11.	Pemerintah perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berdaya guna hingga ke pelosok daerah	85%	13,80%	2,20%	0%	0%
12.	Pemerintah perlu memasukkan muatan kerukunan umat beragama dan antar suku dalam kurikulum di sekolah	92%	6,20%	2%	0%	0%
13.	Pemerintah perlu menetapkan hari besar perayaan kesatuan dan persatuan antar pemeluk agama dan etnis	88%	11%	1%	0%	0%
14.	Pemerintah perlu mendukung kaderisasi baik tokoh agama atau tokoh suku adat	90%	10%	0%	0%	0%
15.	Pemerintah perlu mendukung kegiatan keagamaan dan etnis secara materiil dan moril	93%	6,50%	0,50%	0%	0%
16.	Pemerintah perlu merangkul seluruh umat beragama dan etnis dalam isu yang positif	93%	7%	0,50%	0%	0%

Sumber: Data responden diolah

KETERANGAN :

• SS	: Sangat Setuju
• S	: Setuju
• STS	: Sangat Tidak Setuju
• N	: Netral
• TS	: Tidak Setuju

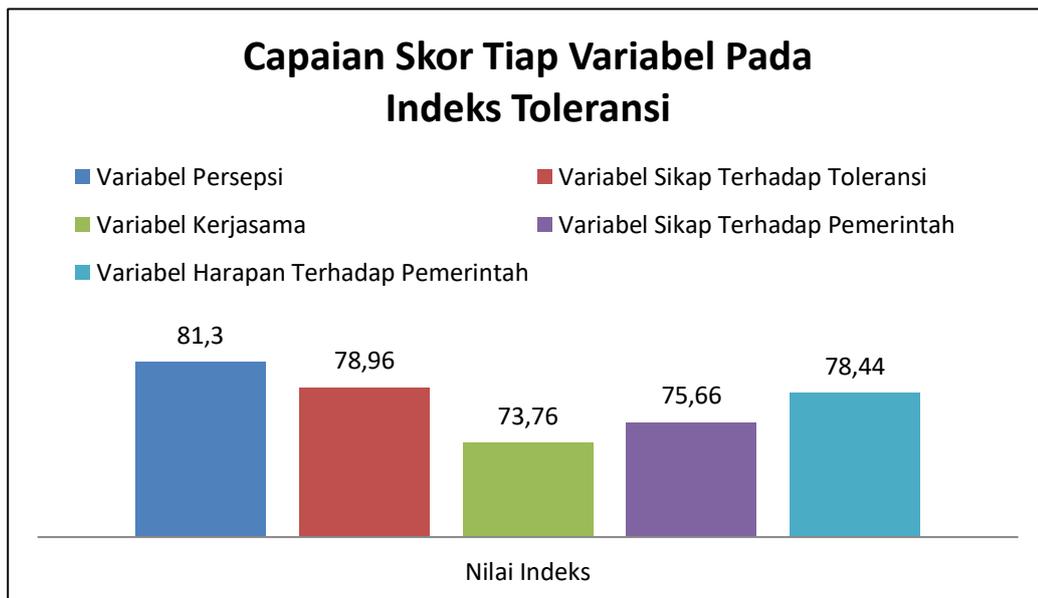
N. Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo

Pengolahan data berdasarkan penghitungan skor untuk mengetahui indeks toleransi antarumat beragama dan etnis bangsa di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7.
Capaian Indeks Toleransi Beserta Komponen Indikatornya

No	Capaian Indeks	Nilai	Kategori
1	Persepsi	81,3	Sangat Tinggi
2	Sikap Terhadap Toleransi	78,96	Tinggi
3	Kerjasama	73,76	Tinggi
4	Sikap Pemerintah	75,66	Tinggi
5	Harapan Terhadap Pemerintah	78,44	Tinggi
Indeks Toleransi		77,62	Tinggi

Jika ditampilkan dalam bentuk grafik maka akan terbaca sebagai berikut:



Gambar 3.
Grafik Capaian Indeks Tiap-Tiap Variabel

O. Kesimpulan

Pegukuran Indeks Toleransi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 menghasilkan indeks sebesar 77,62. Jika di bandingkan dengan capaian tahun lalu yang 75,19 maka terdapat kenaikan 2,43 poin, dan capaian ini telah melampaui target yang di ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yakni sebesar 76,67 dengan peningkatan 0,95 poin.

P. Saran

1. Perlu adanya tambahan konsep kegiatan yang menonjolkan karakter berbudaya dari berbagai etnis dan agama yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan secara bersama yang merupakan ciri khas yang dapat di gemakan suaranya baik secara nasional maupun internasional dan melibatkan siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
2. Berdasarkan variabel persepsi dalam toleransi, masih perlu sebagai berikut :
 - a. adanya program yang dapat meningkatkan kerjasama antar umat beragama agar dapat terjalin dengan baik.
 - b. Para tokoh agama perlu lebih meningkatkan kembali kinerja dalam menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga toleransi umat beragama dan antar etnis.
 - c. Organisasi keagamaan harus meningkatkan potensinya dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga toleransi umat beragama dan antar etnis.
 - d. Pemerintah harus meningkatkan perannya dalam menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga toleransi bermasyarakat antar umat beragama dan etnis. Suara minoritas masyarakat harus di fungsikan sebagai semangat pembenahan menuju penyempurnaan dalam pelayanan terhadap masyarakat khususnya meningkatkan nilai toleransi di Kabupaten sidoarjo.
3. Berdasarkan variabel kerjasama perlu adanya gerakan dari FKUB dan FPK mulai dari masyarakat tingkat bawah dengan lebih intens untuk mensosialisasikan perlunya membina kesatuan dan persatuan dalam membangun nilai toleransi diantara etnis bangsa dan penganut agama yang berbeda.
4. Berdasarkan variabel sikap pemerintah terhadap toleransi yaitu :
 - a. Pemerintah perlu meningkatkan dalam memfasilitasi pembangunan rumah peribadatan dengan baik.

- b. Pemerintah juga perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang aturan pendirian rumah peribadatan dengan baik.
- c. Pemerintah perlu meningkatkan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan forum kesukuan dengan baik.
- d. Pemerintah perlu meningkatkan jaminan hak yang sama dalam prosedur perijinan pendirian sarana peribadatan.
- e. Pemerintah perlu meningkatkan mekanisme prosedur perijinan pendirian sarana peribadatan dengan konsisten kepada semua pemeluk agama.
- f. Pemerintah perlu meningkatkan dalam memfasilitasi dialog antar umat beragama dan antar komunitas etnis bangsa dengan baik.
- g. Pemerintah perlu meningkatkan dalam mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai agama dan etnis bangsa.
- h. Pemerintah perlu meningkatkan dalam bersikap tegas ketika menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama dan etnis bangsa.
- i. Pemerintah perlu meningkatkan sikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama
- j. Pemerintah perlu meningkatkan dalam melindungi kebebasan beribadah tiap-tiap pemeluk agama.

